



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 - 2020
PROVINSI JAWA TIMUR
18 - 22 Desember 2019**

*

**

**

*

JAKARTA 2019



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 - 2020
KE PROVINSI JAWA TIMUR
18 - 22 Desember 2019**

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 di Provinsi Jawa Timur ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019 dan 11 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 di Provinsi Jawa Timur adalah dalam rangka melaksanakan fungsi di bidang pengawasan, yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu fungsi *pegawasan*, *anggaran*, dan *legislasi*, yaitu sebagai berikut:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat serta *stake holder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Timur.
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Timur.

3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
1.	A-375	Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.	Ketua Tim Kunker/ Wkl. Ket. Komisi IV/ F.NasDem
2.	A-147	Riezky Aprilia, S.H., M.H.	F.PDIP
3.	A-197	H. Sunarna, S.E., M.Hum.	F.PDIP
4.	A-220	Ir. Mindo Sianipar	F.PDIP
5.	A-230	Drs. I Made Urip, M.Si.	F.PDIP
6.	A-292	Ir. Moh. Ichsan Firdaus	F.P.GOLKAR
7.	A-101	Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.	F.GERINDRA
8.	A-108	Ir. Sumail Abdullah	F.GERINDRA
9.	A-371	Hj. Sri Wulan, S.E.	F.NasDem
10.	A-389	Yessy Melania, S.E.	F.NasDem
11.	A-020	Luluk Nurhamidah, M.Si.	F.PKB
12.	A-045	H. Muhtarom, S.Sos.	F.PKB
13.	A-556	Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.	F.P.DEMOKRAT
14.	A-567	Bambang Purwanto, S.St., M.H.	F.P.DEMOKRAT
15.	A-431	Dr. H. Slamet	F.PKS
16.	A-441	Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.	F.PKS
17.	A-508	Slamet Ariyadi, S.Psi.	F. PAN
18.	A-502	Haerudin, S.Ag., M.H.	F. PAN
19.	A-471	Ema Umiyyatul Chusnah	F. PPP

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dilaksanakan pada tanggal 18-22 Desember 2019 dan bertempat Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, serta Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

E. GAMBARAN UMUM

1. Profil Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 11100 Bujur Timur – 11404' Bujur Timur dan 70 12' Lintang Selatan – 8048" Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km², sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km². Jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 37.476.757 jiwa (Sumber: Database BPS Tahun 2010).

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kkab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep.

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Lembaga lain, dan 5 Rumah Sakit Daerah. Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan.

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Umumnya Suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas, Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya yang begitu mendunia, kebesaran Jawa Timur juga tercermin dari aneka ragam budayanya, antara lain karapan sapi, pacuan sapi yang hanya ada di Madura, yang diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura. Masyarakat Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah "JER BASUKI MAWA BEYA," yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan komoditas pertanian yang besar. Pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan Provinsi Jawa Timur yang

utama. Kondisi pertanian di Provinsi Jawa Timur sudah dalam keadaan yang baik terbukti dengan banyaknya hasil pertanian yang diekspor baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. Pertanian menjadi lending sektor pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan keunikan tersendiri dalam kerangka perekonomian nasional. Provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan di bidang pertanian serta memiliki peran besar dalam memasok produk pertanian bagi kebutuhan nasional. Sektor pertanian dibagi menjadi 7 sub sektor yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, perikanan, kehutanan dan penebangan kayu.

Salah satu sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur yang memiliki keunggulan yaitu sektor pertanian tanaman pangan. Ekspor pertanian pangan adalah salah satu usaha meningkatkan daya saing ekspor selain perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Komoditas tanaman pangan merupakan salah satu penyumbang devisa negara dari sektor non migas sektor pertanian. Komoditas tanaman pangan Provinsi Jawa Timur yaitu komoditas jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah dan padi. Hal ini menandakan bahwa adanya peran 2 penting ekspor komoditas tanaman pangan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah untuk berperan aktif meningkatkan ekspor.



Ekspor komoditas tanaman pangan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013- 2016 yang memiliki nilai terbesar yaitu komoditas ubi kayu sebesar US\$ 11459215 juta, kemudian komoditas kedelai sebesar US\$ 4722224 juta, disusul komoditas jagung sebesar US\$ 4451780 juta, kemudian komoditas kacang tanah sebesar US\$ 137862 juta, dan yang paling kecil yaitu komoditas padi sebesar US\$ 68297 juta. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Timur tahun 2017 menduduki peringkat ketiga setelah sektor Industri Pengolahan (29,03 persen) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,18 persen), yaitu sebesar 12,80 persen.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir peranan Sektor Pertanian mengalami penurunan. Besarnya peranan sektor pertanian di tahun 2013 adalah 13,46 persen, kemudian di tahun 2014 naik menjadi 13,56 persen, naik lagi di tahun 2015 menjadi 13,65 persen, mulai menurun di tahun 2016 menjadi 13,43 persen dan di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 12,80 persen. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2017 peranan sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,76 persen poin. Penurunan tersebut membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat pentingnya sektor pertanian terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya di Jawa Timur.

Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor yaitu Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan. Peranan masing-masing sub sektor terhadap perekonomian Jawa Timur tahun 2017 sebesar 9,78 persen, 0,49 persen dan 2,53 persen. Sub sektor Kehutanan memiliki peranan hampir sama dibanding tahun 2016. Sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,69 persen poin yaitu dari 10,49 persen menjadi 9,78 persen. Sub sektor Perikanan justru mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen poin dibanding tahun 2016 yaitu dari 2,47 persen menjadi 2,53 persen.

**Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,46	13,56	13,65	13,43	12,80
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10,61	10,59	10,62	10,47	9,78
a. Tanaman Pangan	4,49	4,38	4,43	4,39	3,90
b. Tanaman Hortikultura	1,16	1,17	1,19	1,22	1,18
c. Tanaman Perkebunan	2,08	2,14	2,12	2,01	1,86
d. Peternakan	2,73	2,75	2,73	2,70	2,70
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,53	0,54	0,54	0,49	0,49
3 Perikanan	2,32	2,44	2,49	2,47	2,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terdiri dari Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Dibanding tahun sebelumnya, peranan Tanaman Pangan semakin menurun dari 4,39 persen menjadi 3,90 persen walaupun di tahun 2015 sempat naik menjadi 4,43 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan tanaman pangan turun tajam sebesar 0,59 persen

yaitu dari 4,49 persen menjadi 3,90 persen. Hal serupa juga terjadi pada peranan subsektor tanaman hortikultura jika dibanding tahun 2016 mengalami penurunan dari 1,22 persen menjadi 1,18 persen. Subsektor Tanaman Perkebunan mengalami penurunan sejak tahun 2014 yaitu dari 2,14 persen menjadi 1,86 persen. Sedangkan untuk subsektor peternakan serta Jasa Pertanian dan Perburuan memiliki peranan yang hampir stagnan jika dibanding tahun sebelumnya.

Menurunnya peranan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam struktur perekonomian Jawa Timur membutuhkan perhatian yang lebih dalam penanganannya, sehingga sektor ini tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Sektor pertanian sangat erat hubungannya dengan angka kemiskinan, karena sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dapat dikatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur harus terintegrasi ke dalam sektor tersebut. Selama sektor pertanian tidak ditangani dengan baik, bisa dikatakan mustahil kemiskinan di Jawa Timur dapat berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian di Jawa Timur harus terus menerus dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Untuk mengukur perkembangan pertanian diperlukan indikator yang dapat memberi petunjuk mengenai gambaran perkembangan sektor pertanian selama kurun waktu tertentu. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian mengalami pertumbuhan 1,48 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan di tahun 2016 mencapai 2,41 persen, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,93 persen poin. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terus mengalami penurunan karena hanya di tahun 2014 saja yang mengalami kenaikan yaitu dari 3,06 persen di tahun 2013 menjadi 3,54 persen di tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan dan penebangan kayu tahun 2017 merupakan pertumbuhan yang tertinggi sebesar 7,23 persen, kemudian pertumbuhan subsektor perikanan sebesar 4,82 persen dan pertumbuhan subsektor peternakan mencapai 3,89 persen. Dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah subsektor kehutanan dan penebangan kayu karena pertumbuhan di tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,75 persen. Subsektor lain yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah subsektor perkebunan (1,36 persen) sementara tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,74 persen, sedangkan untuk subsektor lainnya mengalami penurunan.

**Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,06	3,54	3,28	2,41	1,48
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,12	2,95	2,70	2,32	0,38
a. Tanaman Pangan	1,38	2,98	3,13	1,76	-2,18
b. Tanaman Hortikultura	-1,13	3,06	5,03	6,88	0,16
c. Tanaman Perkebunan	1,81	4,97	1,25	-0,74	1,36
d. Peternakan	1,07	1,15	2,01	3,48	3,89
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4,31	3,59	3,00	2,44	1,58
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	6,54	0,13	3,34	-8,75	7,23
3 Perikanan	11,58	6,87	5,71	5,06	4,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Menurunnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian menunjukkan perlu adanya perbaikan dari berbagai hal misalnya perbaikan dalam sistem agribisnis, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta membatasi pengalihan fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian. Untuk itu diperlukan adanya suatu kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui suatu program-program baik jangka panjang maupun jangka pendek. Program-program dimaksud diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor pertanian. Program jangka pendek misalnya sertifikasi produk, perbaikan fasilitas dan infrastruktur serta perbaikan penataan wilayah. Program jangka panjang yaitu melalui pemetaan wilayah, memperluas jaringan industri dan melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Selain program-program tersebut, sektor pertanian juga memerlukan dukungan yang bersifat riil seperti dukungan modal dari lembaga keuangan maupun pemerintah kepada pelaku usaha pertanian (petani), dan juga diperlukan informasi tentang pertanian yang harus disampaikan kepada petani, serta meningkatkan produksi dan aksesibilitas terhadap pupuk.

2. Profil Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat.

Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, dimana terdapat layanan kapal feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (Pelabuhan Ujung). Saat ini telah beroperasi Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila.

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan. Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya (Bukit Jaddih, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening - Langkap - Modung dsb.), budaya (Karapan sapi, dsb.), serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.

Tanaman hias, sejak dulu telah digemari masyarakat sebagai penghias taman dan pekarangan rumah serta acara-acara resmi tanaman hias dewasa ini telah menjadi trend tersendiri di kalangan menengah hingga kalangan atas. Bunga melati merupakan salah satu produk hortikultura. Sebagai bunga puspa bangsa mutu dan pemanfaatan melati perlu ditingkatkan, sebagai tanaman hias pot, tanaman taman maupun sebagai tanaman produksi bunga. Tanaman melati mempunyai kegunaan yang beraneka ragam dan mempunyai potensi dalam pengembangan agroindustri. Selama ini pemanfaatan bunga melati masih terbatas pada acara-acara seremonial seperti upacara perkawinan, hiasan sanggul, dekorasi acara tabur bunga serta acara-acara religi dan lain sebagainya. Sebagai bunga yang

beraroma, bunga melati sangat potensi untuk bahan baku minyak wangi. Selain untuk parfum, wangi bunga melati bisa juga digunakan untuk aromaterapi.

Luas tanaman melati di Indonesia tahun 2018 seluas 809 hektar yaitu 740 ha di Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, Batang, Pemalang) dan di Jawa Timur 39 ha (Bangkalan, Pasuruan). Tanaman melati di Kabupaten Bangkalan tumbuh dan berkembang di beberapa daerah antara lain Kecamatan Burneh, Tanah merah, Bangkalan, dan Kecamatan Socah. Namun tingkat populasi serta produksi bunga segar masih terdapat di Kecamatan Burneh. Produksi melati nasional tahun 2018 sebesar 32.578 ton. Produksi melati di Kab. Bangkalan 384 ton. Luas melati di Kab. Bangkalan 24, 8 ha di Kec. Burneh, dan tersebar di 2 desa yaitu Desa Tunjung dan Desa Arok. Ada sekitar 200 orang petani yang berbudidaya melati. Belum termasuk para peronce melati yang biasanya dilakukan ibu rumah tangga di kawasan tersebut. Potensi pengembangan masih sekitar 50 ha termasuk ke Kec. Kramat. Pemasaran melati kebanyakan di beli oleh tengkulak dan dipasarkan untuk wilayah Jawa Timur dalam bentuk melati segar (kuncup melati) untuk dironce.

Komoditas melati ini telah dilepas sebagai Komoditas Unggul Nasional "rato ebu" (SK Mentan Nomor 515/Kpts/SR.120/2005). Permintaan bunga melati untuk kebutuhan di daerah sendiri masih belum mencukupi. Bunga melati yang dimaksud adalah jenis bunga melati putih (*jasminum sambac*). Produksi bunga melati pada tahun 2019 mencapai 384.019 kg dari luasan 24,6 ha.

Pengembangan melati di Bangkalan masih memiliki peluang besar untuk perluasan areal, salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan menjadi kampung melati, karena permintaan pasar terus meningkat, namun perlu mendapat fasilitasi Pemerintah, antara lain:

- a. Jalan usaha tani agar mempermudah dalam mengangkut saprodi ke kebun.
- b. Sarana pengairan (pompa air), karena saat musim kemarau, sering kekurangan air yang akan berdampak pada produksi melati.
- c. Bantuan perbenihan terutama dalam mengembangkan varietas Ratoh Ibh untuk perluasan tanam dan peremajaan tanaman.
- d. Dukungan sarana pascapanen, yang dibutuhkan terutama *coolbox* untuk penyimpanan dan pengiriman melati serta gerobak dorong.
- e. Pengembangan industri hilir seperti pengolahan melati untuk kebutuhan industri teh maupun minyak atsiri, karena kalau hanya dijual dalam bentuk segar, harga sangat berfluktuasi antara Rp10.000,00 s.d. Rp300.000/kg. Harga melati pada bulan-bulan tertentu yang banyak acara pernikahan bisa mencapai Rp300.000,00/kg, sedangkan di bulan sepi harga bisa jatuh sampai Rp10.000,00/kg (antara Idul Fitri dan Idul Adha).

3. Profil Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Sampang adalah sebuah kabupaten yang ada di sebelah utara bagian timur dari Pulau Jawa tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur.

Batas Daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan

dengan Selat Madura. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113°08' - 113°39' Bujur Timur dan 6°05' - 7°13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak ±100 km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ±2 jam.

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 km² atau 11,44% yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km² (3,46 %).

Karena lokasi Kabupaten Sampang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten lainnya di Madura, wilayah ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahun, musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai Maret merupakan musim penghujan sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September.

Rata-rata hari hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Ketapang, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Sokobanah dan Kedungdung. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Banyuates, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Camplong dan Pangarengan. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada Juli dan Desember, sedang bulan dengan curah hujan paling rendah terjadi pada Juni dan Agustus.

Area sawah di Kabupaten Sampang diairi oleh tiga jenis sumber air yaitu air hujan, air sungai dan air tanah. Sawah yang diairi oleh air hujan seluas 11.082 Ha, air sungai seluas 3.452 Ha dan sawah yang diairi oleh air tanah seluas 226,70 Ha. Kecamatan yang menggunakan sumber pengairan air tanah adalah Kecamatan Sampang, Omben, Jrengik, dan Sokobanah.

F. HASIL KUNJUNGAN

1. Peninjauan Pelayanan Karantina Bandara Juanda serta Pertemuan dan Diskusi di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya

Secara khusus dijelaskan, tugas pokok Badan Karantina Pertanian untuk mencegah hama, penyakit, hewan karantina dan mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam negeri. Harus dilakukannya pengawasan semaksimal mungkin, agar hama, penyakit dan organisme pengganggu tersebut tidak masuk ke dalam dan luar negeri atau dari suatu area ke area lain.

Pada saat kunjungan dijelaskan bahwa sistem pengawasan di Bandara Juanda ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di *Screening Check Point* (SCP) yang ada di terminal keberangkatan dan di terminal internasional. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap sisi keamanan di samping masalah

karantina dan bea cukai. Lebih lanjut lagi, tujuan utama pelaksanaan sistem pengawasan terintegrasi ini terdiri atas dua hal, yaitu untuk memperkuat perkarantinaan dan melalui kerjasama sinergi CIQ (*Custom Immigration and Quarantine*) dapat memperkuat pengawasan di Indonesia.

Pada saat kunjungan Badan Karantina Pertanian bersama dengan Tim Komisi IV DPR RI melakukan pelepasan Ekspor 32 Komoditas Pertanian Asal Provinsi Jawa Timur, dengan total nilai ekonomi: Rp199,3 miliar, 32 eksportir ke 20 negara, antara lain PT Sari Makmur Tunggal Mandiri - Kopi Robusta - 93 ton, tujuan Mesir senilai Rp2,25 miliar, dan PT Hans Organic Jaya - Sarang Burung Walet - 130 kg, ke Cina senilai Rp3,9 miliar.

Tanggapan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Badan Karantina Pertanian. Namun disayangkan, fasilitas serta sarana prasarana karantina pertanian (maupun perikanan) di Bandara Surabaya belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja serta tanggung jawab karantina sebagai garda terdepan perlindungan negara. Selain itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mendukung upaya Badan Karantina Pertanian untuk mendukung peningkatan ekspor komoditas pertanian, dengan tetap fokus pada tugas dan fungsi utama Badan Karantina Pertanian.

2. Peninjauan Gudang BULOG Bangkalan

Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke salah satu gudang Bulog di Kabupaten Bangkalan untuk melihat sarana dan prasarana gudang Perum Bulog. Pada kunjungan tersebut, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa gambaran sebagai berikut:

REALISASI PENGADAAN KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Satuan ton setara beras

NO.	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	SURABAYA UTARA	74.300	23.639	30.626	15.097
2	SURABAYA SELATAN	47.500	24.491	33.084	20.582
3	BOJONEGORO	76.300	41.060	42.144	48.921
4	MADIUN	38.900	27.027	24.058	14.528
5	KEDIRI	37.200	29.636	23.075	13.626
6	BONDOWOSO	27.900	30.684	24.585	3.043
7	MALANG	42.900	18.341	21.073	11.089
8	PROBOLINGGO	59.100	40.973	30.099	13.282
9	BANYUWANGI	87.200	12.450	31.609	8.876
10	TULUNG AGUNG	35.500	19.559	20.546	12.664
11	JEMBER	100.500	67.213	35.648	36.846
12	MADURA	25.000	24.208	9.026	18.518
13	PONOROGO	44.701	22.311	25.639	21.371
TOTAL		697.000	381.590	351.214	238.445

PENYALURAN BANSOS RASTRA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

No	Kanwil/Kanca	REALISASI BANSOS RASTRA									TOTAL SALUR BANSOS RASTRA (KG)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	SPP	DO	%
I	Kanca Madura	-	1,069,660	2,740,530	4,404,030	7,036,490	1,246,900	1,044,620	1,515,700	-	19,057,930	19,057,930	100%
II	Kanca Ponorogo	456,710	456,710	456,710	456,710	456,710	-	-	-	-	2,283,550	2,283,550	100%
JUMLAH TOTAL		456,710	1,526,370	3,197,240	4,860,740	7,493,200	1,246,900	1,044,620	1,515,700	-	21,341,480	21,341,480	100%

Data tanggal 1 Januari s.d 02 Desember 2019 (closing)

Penyaluran BPNT Wilayah Jawa Timur

NO	KANWIL	KOMODITI	PAGU sd Des 2019		PENJUALAN BPNT SD 02 DES 2019				TOTAL PENJUALAN BPNT		PERSENTASE ATAS PAGU
			KPM	Kg *)	Melalui RPK, E-Warong dan Agen		Melalui Distributor		SD 02 DES 2019		
					Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	
1	JATIM	BERAS	2,807,309	81,749,450	5,242,557	49,315,811,950	7,489,410	60,999,913,400	12,731,967	110,315,725,350	15.57%
		TELUR			18,518	437,961,400	-	-	18,518	437,961,400	

*) asumsi 5 kg beras per KPM

Sumber data : aplikasi penjualan Langsung dan SIL

Data KPM berasal dari Laporan Kanwil (update 28 Okt 2019 pkl 12.15)

POSISI PERSEDIAAN BERAS 2019 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Data per tanggal 02 Desember 2019

Satuan : ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	KANCA I SURABAYA UTARA	184.216	47	184.263
2	KANCA II SURABAYA SELATAN	70.626	3	70.629
3	KANCA III BOJONEGORO	44.726	367	45.093
4	KANCA IV MADIUN	13.037	9.431	22.468
5	KANCA V KEDIRI	83.386	2	83.389
6	KANCA VI BONDOWOSO	6.306	8.574	14.880
7	KANCA VII MALANG	31.831	422	32.253
8	KANCA VIII PROBOLINGGO	13.331	10.254	23.585
9	KANCA IX BANYUWANGI	35.042	1.786	36.829
10	KANCA X TULUNGAGUNG	16.257	56	16.314
11	KANCA XI JEMBER	37.798	20.090	57.889
12	KANCA XII MADURA	6.326	217	6.543
13	KANCA XIII PONOROGO	18.595	2	18.597
JUMLAH		561.479	51.252	612.731

Tanggapan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi ketersediaan 612.713 ton persediaan beras, baik CBP maupun komersial di seluruh wilayah Jawa Timur, dimana untuk wilayah Madura sejumlah 6.543 ton. Pasokan beras tersebut terbilang aman dan memastikan ketersediaan pasokan beras tersebut. Seperti yang diketahui beras merupakan pangan pokok utama dan volume konsumsinya di masyarakat yang terbesar dibanding bahan pangan lainnya. Lebih lanjut lagi, usaha pemerintah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional semakin menghadapi tantangan seiring dengan semakin luasnya perdagangan global dan perubahan cuaca. Sehingga, dalam pelaksanaan kebijakan pangan, Bulog harus tetap dilibatkan sebagai lembaga pangan nasional yang profesional dan memiliki sistem serta mekanisme yang terintegrasi.

Selanjutnya, pemerintah melalui Perum Bulog harus berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pangan, terutama beras bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah juga berperan aktif untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pangan bagi golongan masyarakat kurang mampu. Hal ini mengingat pentingnya kecukupan pangan bagi masyarakat dunia, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai fondasi bagi sektor-sektor strategis lainnya. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut, pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu dan kewajiban negara. Secara makro, pangan bukan lagi sekadar komoditas politik, tetapi harus menjadi instrumen ketahanan nasional. Secara praktis, pemenuhan pangan sangat penting untuk ditempatkan sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Pertemuan di Kantor Bupati Sampang

- a. Dalam kesempatan pertemuan dan diskusi, diserahkan secara simbolik bantuan kepada masyarakat Kabupaten Sampang, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sebanyak 2.000 batang Bibit Produktif dari Balai Pengelolaaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Balai PDASHL) Brantas Sampean.
 - 2) Bantuan dari Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3), berupa:
 - a) Sebanyak 3 (tiga) unit Motor Sampah.
 - b) Sebanyak 1 (tiga) unit Mesin Pencacah Sampah Organik.
 - c) Sebanyak 1 (satu) unit Mesin Pengepres Sampah Plastik.
- b. Dalam pertemuan dan diskusi juga disampaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang terkait minimnya fasilitas pasar tradisional. Untuk itu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing (Ditjen PDS) Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan komitmen terkait rencana pembangunan 1 (satu) unit Pasar Higienis di sekitar

Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan *cold storage* sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan tata waktu dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Selain itu juga dibahas permasalahan pergaraman nasional yang disampaikan oleh Forum Petani Garam Madura, yaitu sebagai berikut:

1) Pokok Permasalahan:

- a) Validasi *database* garam nasional yang belum tersinkronisasi dan integrasi.
- b) Tata kelola pergaraman nasional yang belum satu pintu.
- c) Regulasi tata niaga garam, termasuk importasi garam yang masih tumpang tindih.
- d) Belum adanya standarisasi harga pokok penjualan dan standarisasi mutu produk garam bahan baku.
- e) Penyerapan garam rakyat (garam bahan baku local) yang belum maksimal.
- f) Importasi garam yang tidak proporsional dan tidak ada pengawasan yang ketat.

2) Usulan Solusi:

- a) Tata kelola pergaraman nasional harus kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, khususnya Pasal 37 terkait pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas garam.
- b) Segera didorong untuk mempercepat validasi *database* garam nasional agar menjadi *database* garam yang terintegrasi dan terjaga akuntabilitasnya sebagai acuan neraga garam nasional.
- c) Segera didorong untuk mempercepat terbitnya dan berlakunya Peraturan Presiden tentang komoditas garam sebagai bahan pokok penting, agar segera juga bias ditetapkan harga pokok penjualan dan standardisasi mutu garam bahan baku.
- d) Tata kelola pergaraman nasional harus melalui satu pintu, khususnya tata kelola distribusi *supply* dan *demand* dengan *system buffer*, agar ketersediaan stok nasional selalu terjaga, termasuk dalam upaya menjaga stabilitas harganya.
- e) Semua importir dan industri garam diharuskan menyerap garam rakyat, dan jika garam rakyat masih banyak menumpuk di gudang-gudang penyimpanan, maka importasi garam harus dihentikan hingga garam rakyat terserap maksimal.
- f) Dilakukannya revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2014 terkait:
 - 1) penetapan klaster garam dilakukan setelah proses olehan (selama ini dilakukan pada tingkat bahan baku).

- 2) Klatur garam industri aneka pangan, pengasinan ikan, penyamakan kulit, *water treatment*, dan lainnya agar dikembalikan ke klatur semula, yaitu klatur garam konsumsi.
- g) Semua peraturan terkait importasi garam agar ditinjau ulang dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, dengan penetapan kuota impor harus sesuai dengan *database supply* dan *demand* yang sudah tersinkronisasi dan terintegrasi antarkementerian terkait.
- h) Untuk efisiensi biaya produksi garam bahan baku, agar harga jual lebih kompetitif dan agar kualitas produk tetap terjaga, bantuan infrastruktur dan fasilitas peralatan produksi seperti *geomembrane* masih sangat dibutuhkan bagi petani garam.

Tanggapan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Forum Petani Garam Madura dan mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan PT Garam Indonesia untuk melakukan kajian atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Petani Garam Madura dalam rangka mencari solusi terbaik atas permasalahan pergaraman nasional yang terjadi selama ini.

4. Penanaman Pohon di Hutan Kota Sampang

- a. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas Sampang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung (mulai dari kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung).
- b. Kegiatan BPDASHL Brantas Sampang di Pulau Madura pada tahun 2019 terdiri:
 - 1) Pembangunan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH)
 - ✓ 10 unit di Desa Ampara'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
 - ✓ 10 unit di Desa Kokop, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan; dan
 - ✓ 2 unit di Desa Alas Kembang, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan.
 - 2) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Luar Kawasan
 - ✓ 17 unit di Kabupaten Sumenep;
 - ✓ 4 unit di Kabupaten Bangkalan;
 - ✓ 2 unit di Kabupaten Sampang; dan
 - ✓ 4 unit di Kabupaten Pamekasan.
 - 3) Produksi Bibit Produktif
 - ✓ Di Kabupaten Sumenep sebanyak 31.500 batang bibit;
 - ✓ Di Kabupaten Bangkalan sebanyak 28.500 batang bibit;

- ✓ Kabupaten Sampang 8.000 batang bibit; dan
 - ✓ Kabupaten Pamekasan 17.000 batang bibit.
- c. Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Balai PDASHL Brantas Sampean memberikan bantuan sebanyak 2.000 batang bibit kepada masyarakat Kabupaten Sampang, yang sebagian ditanam di Hutan Kota Sampang.

5. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan.
- b. Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan pengembangan sarana prasarana pertanian, kelautan dan perikanan seperti *cold storage*, hingga pembangunan pasar higienis, serta pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan seperti dukungan pengembangan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya serta pengembangan pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sinkronisasi APBN dan APBD agar dalam penyusunan rencana kerja terintegrasi sesuai kebutuhan dari Pusat hingga Daerah.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan dikembangkan berdasarkan zona atau klasterisasi mengacu kepada komoditas/produk unggulan strategis setiap wilayah, dimana dalam pengembangannya dapat dimulai dengan *pilot project* (demplot).

- d. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat *pilot project* di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Madiun, Kotamadya Madiun, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang dengan menunjuk 1 (satu) desa di setiap wilayah kabupaten/kota tersebut untuk menjadi pengecer pupuk resmi, berupa BUMDES yang berbentuk Koperasi.

Selanjutnya BUMDES tersebut juga bekerja sama dengan Perum Bulog dimana Perum Bulog berperan sebagai penyerap bahan pokok yang dihasilkan apabila tidak terserap ke pasar.

- e. Komisi IV DPR RI menerima masukan dan saran dan akan mendorong program-program yang dapat mengembangkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta pangan di Provinsi Jawa Timur.

6. Peninjauan Bank Sampah Induk Surabaya

- a. Kegiatan Bank Sampah Induk Surabaya pertama kali dilakukan oleh Ibu Anindita (selaku Pendiri) di kota Surabaya, yang selanjutnya pada tahun 2010

bersama relawan mahasiswa ITS dan berbagai universitas lainnya mendirikan Bank Sampah Bina Mandiri.

Pada tahun 2012, Bank Sampah Bina Mandiri mendapatkan bantuan dana CSR dari PT PLN (Persero), sehingga dapat mengembangkan usaha pengelolaan sampah. Selanjutnya pada tahun 2017 Bank Sampah Bina Mandiri berganti nama menjadi Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) dan diresmikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta mendapat penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik Tingkat Nasional.

b. Beberapa kendala dalam operasional usaha pengelolaan sampah yang dialami oleh BSIS adalah sebagai berikut:

1) Lahan Kantor dan Gudang yang Masih Berstatus Sewa

Lahan untuk kantor dan gudang yang sampai saat ini masih berstatus sewa, yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan biaya sewa setiap tahunnya akan ada kenaikan. Biaya sewa selama ini ditanggulangi sepenuhnya dari keuntungan penjualan sampah daur ulang, dimana prinsip dasar bisnis sampah daur ulang yang dikelola oleh BSIS adalah bisnis sosial (*sosioentrepreneurship*) yang tidak mengejar keuntungan semata (*non profit oriented*).

2) Minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat beban biaya sewa yang tinggi, BSIS mengalami kesulitan untuk menambah jumlah SDM/karyawan. Sementara di lain pihak jumlah nasabah yang perlu mendapatkan pembinaan/pendampingan serta jumlah tonase sampah yang harus diolah semakin meningkat setiap tahunnya.

3) Minimnya Kesejahteraan Karyawan

Aspek kesejahteraan karyawan belum mampu dipenuhi seluruhnya, dimana rata-rata karyawan, baik di kantor maupun di gudang dan *bankeling*, masih belum mendapatkan upah yang layak untuk hidup di Surabaya. Dapat digambarkan bahwa rata-rata upah karyawan BSIS adalah berkisar antara Rp2.000.000,00 - Rp2.500.000,00 yang terdiri dari gaji pokok, uang makan, bonus, insentif, dan tunjangan kesehatan.

Hal ini menjadi kendala dalam mempertahankan SDM yang sudah ada maupun untuk menambah SDM baru.

4) Terbatasnya Luas Lahan untuk Kantor dan Gudang

BSIS melayani seluruh nasabah di Kota Surabaya, baik nasabah individu maupun kolektif, seperti bank sampah skala RT/RW, sekolah, instansi, dan komunitas.

Luas lahan digunakan oleh BSIS saat ini belum dapat menampung jumlah sampah anorganik diterima dari masyarakat Surabaya, terlebih saat dalam kondisi harga sampah sedang turun drastis, maka BSIS harus menimbun sampah di gudang sampai harga kembali stabil.

Namun disisi lain BSIS juga tidak dapat menghentikan/menolak nasabah/masyarakat yang bermaksud menyerahkan sampah terpilahnya, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan barang/sampah.

5) Kendala dalam Penyaluran Sampah Kemasan Multilayer

Sebelumnya, sampah kemasan *multilayer* (sampah kemasan yang memiliki lapisan aluminium foil di bagian dalam dan lapisan plastik di bagian luar, seperti kemasan detergen, makanan ringan, shampo *sasched*, dan sejenisnya) dapat disalurkan ke pabrik pengolahan sampah multilayer milik Unilever seharga Rp500,00/kg.

Namun sejak 3 bulan September 2019, pihak Unilever menghentikan penerimaan sampah tersebut, sedangkan para nasabah dan bank sampah unit masih terus menyerahkan sampah dimaksud.

Agar motivasi masyarakat dalam memilah tidak mengalami penurunan, maka BSIS berkomitmen untuk tetap menampung sampah tersebut di gudang penyimpanan barang/sampah.

c. Aspirasi BSIS

1) Adanya peran Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dalam hal:

- a) Fasilitasi kepada pihak swasta untuk bantuan berupa penyediaan lahan yang lebih luas untuk kantor dan gudang dengan biaya sewa yang lebih terjangkau, atau bahkan bila memungkinkan mendapatkan hibah lahan untuk operasional kantor dan gudang BSIS.
- b) Fasilitasi kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam program EPR (*Extended Producer Responsibility*), sehingga pihak swasta bersedia membeli sampah kemasan *multilayer* yang dihasilkan oleh BSIS.
- c) Menerbitkan regulasi dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku sampah daur ulang.

2) Dengan dipenuhinya aspirasi sebagaimana butir 1) di atas, maka diharapkan:

- a) BSIS dapat meningkatkan jumlah nasabah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah langsung dari sumbernya.
- b) Dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah/masyarakat, antara lain layanan pembinaan/pendampingan bank sampah, layanan jemput sampah gratis (dengan cara menambah armada *bankeling*), layanan pelatihan pemilahan sampah di Kantor BSIS atau *inhouse-training* pada instansi Pendidikan, komunitas, event, serta program pelatihan lainnya.
- c) Dapat meningkatkan jumlah tonase serapan sampah anorganik dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang dapat disalurkan ke industri daur ulang dan mengurangi sampah yang berakhir ke Tempat Pengumpulan Akhir (TPA).

7. Peninjauan Kebun Binatang Surabaya

- a. Kebun Binatang Surabaya (KBS) pertama kali didirikan berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “*Soerabaiasche Planten-en Dierentuin*” (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) atas jasa seorang jurnalis bernama H.F.K. Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang.
- b. Kebun Binatang Surabaya mempunyai luas 15 Ha, dan secara legal formal diakui sebagai lembaga konservasi ex-situ pada tahun 2002 melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 Tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Ex-situ Satwa Liar. Sejak pendirian dan terhitung sampai tanggal 20 Agustus 2010, KBS dikelola oleh Perkumpulan.
- c. Dalam perjalanan pengelolaan KBS, muncul berbagai konflik internal kepengurusan (dualisme kepemimpinan antara Stanny Soebakir dan Basuki) yang berimbas pada pengelolaan koleksi satwa dan mengakibatkan banyak kematian satwa. Puncak konflik kepengurusan internal Pengelola KBS muncul lagi pada akhir tahun 2009.
- d. Dengan kondisi tersebut, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan internal KBS.
- e. Terakhir, telah konflik internal telah dapat diselesaikan, dan KLHK telah menerbitkan izin Lembaga Konservasi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 340/Menlhk/Setjen/ KSA.2/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Izin Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- f. Saat ini pengelolaan KBS oleh PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan gambaran pengelolaan sebagai berikut:
 - 1) Total Koleksi Satwa sebanyak 2.350 ekor dari 213 jenis satwa;
 - 2) Jumlah Pengunjung mencapai 2.000.000 orang pada tahun 2019;
 - 3) Keberhasilan pelaksanaan pengembangbiakan satwa, peningkatan fasilitas kandang satwa serta pembangunan sejumlah shelter pengunjung.

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung upaya penguatan Karantina dengan melakukan peningkatan fasilitas, maupun sarana prasara karantina yang baik dan mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian.

2. Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog dapat menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang stabil terutama untuk komoditas beras, minyak, gula, dan tepung terigu.
3. Komisi IV DPR RI mendukung komitmen Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pembangunan 1 (satu) unit Pasar Higienis di sekitar Kecamatan Camplong dan *cold storage* di Kabupaten Sampang, sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan tata waktu dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Forum Petani Garam Madura dan mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan PT Garam (Persero) untuk melakukan kajian atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Petani Garam Madura dalam rangka mencari solusi terbaik atas permasalahan pergaraman nasional yang terjadi selama ini.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sinkronisasi APBN dan APBD agar dalam penyusunan rencana kerja terintegrasi sesuai kebutuhan dari Pusat hingga Daerah.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan dikembangkan berdasarkan zona atau klasterisasi mengacu kepada komoditas/produk unggulan strategis setiap wilayah, dimana dalam pengembangannya dapat dimulai dengan *pilot project* (demplot).

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat *pilot project* di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Madiun, Kotamadya Madiun, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang dengan menunjuk 1 (satu) desa di setiap wilayah kabupaten/kota tersebut untuk menjadi pengecer pupuk resmi, berupa BUMDES yang berbentuk Koperasi.

Selanjutnya BUMDES tersebut juga bekerja sama dengan Perum Bulog dimana Perum Bulog berperan sebagai penyerap bahan pokok yang dihasilkan apabila tidak terserap ke pasar.

7. Komisi IV DPR RI mendukung peran serta Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah terkait pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Induk Surabaya serta unit pengelola sampah sejenis dalam hal:
 - a. Fasilitasi kepada pihak swasta untuk bantuan berupa penyediaan lahan yang lebih luas untuk kantor dan gudang dengan biaya sewa yang lebih terjangkau, atau bahkan bila memungkinkan mendapatkan hibah lahan untuk operasional kantor dan gudang pengelolaan sampah.
 - b. Fasilitasi kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam program EPR (*Extended Producer Responsibility*), sehingga pihak swasta bersedia membeli sampah kemasan multilayer yang dihasilkan oleh pengelola sampah.
 - c. Menerbitkan regulasi dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku sampah daur ulang.

H. PENUTUP

Demikian hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Jawa Timur. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan, dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Desember 2019

Ketua Tim,

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.
A-375

FOTO-FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/27008/t/Badan+Karantina+Harus+Didukung+Peralatan+Memadai>

<https://www.instagram.com/p/B6Pbky8lzNc/?igshid=qhwiol5rjeog>

https://twitter.com/DPR_RI/status/1207520316542447616?s=08

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2389112871189524&id=524324397668390